

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN PUBLIK,
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**RAHMADENI HARISKA
NIM. 02117/2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

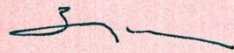
**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN PUBLIK,
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

Nama : Rahmadeni Hariska
Nim/BP : 02117/2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Syamwil, M.Pd

NIP. 19590820 198703 1 001

Pembimbing II

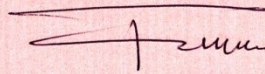


Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19720910 199802 2 003

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI

Nama : Rahmadeni Hariska

NIM/BP : 02117/2008

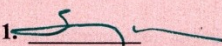
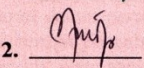
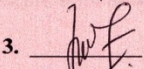
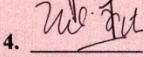
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Keuangan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Syamwil, M.Pd	1. 
2. Sekretaris	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	Nelvrita, SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmadeni Hariska
Nim/BP : 02117/2008
Tempat/Tanggal Lahir : Sumani, 15 April 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Sinta Melati F/9 Lapai-Padang
No. HP/Telepon : 085263155623
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, tulisan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya akan bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2012



Rahmadeni Hariska
NIM. 02117/2008

ABSTRAK

Rahmadeni Hariska (02117/2008) : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*/CSR) di BEI. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2012.

**Pembimbing : I. Drs.Syamwil, M.Pd
II. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh : (1) Kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR, (2) Kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR, (3) Ukuran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR).

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, sebanyak 25 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang diterbitkan BEI selama 4 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaan dengan $t_{hitung} 0,095 < t_{tabel} 1,6607$, dan tingkat signifikansi $0,925 > \alpha 0,05$ sehingga H_1 ditolak. (2) Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaan dengan $t_{hitung} -2,227 < t_{tabel} 1,6607$, dan tingkat signifikansi $0,028 < \alpha 0,05$ sehingga H_2 ditolak. (3) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaan dengan $t_{hitung} 5,569 > t_{tabel} 1,6607$, dan tingkat signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga H_3 diterima.

Penelitian ini menyarankan agar perusahaan emiten meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Bagi investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, agar dapat menambah variabel lain terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, pujian yang jauh lebih baik dari apapun yang dapat penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*/CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari, skripsi ini bukanlah semata-mata atas kemampuan sendiri, tapi atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I, dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Teristimewa buat Ayah dan Ibu, Kakak beserta Adik-adik dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya atas bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan motivasi dan kerja sama dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia penelitian dan akademis. Amin.

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. <i>Corporate Social Responsibility/CSR</i> (Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial).....	11
2. Kepemilikan Manajerial.....	23
3. Kepemilikan Publik.....	25
4. Ukuran Perusahaan.....	26
5. Penelitian Terdahulu.....	28

6. Pengembangan Hipotesis.....	30
B. Kerangka Konseptual.....	34
C. Hipotesis.....	36

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Variabel Penelitian dan pengukuran Variabel.....	40
F. Uji Asumsi Klasik.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Definisi Operasional.....	47

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
B. Deskriptif variabel penelitian.....	52
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	67
D. Hasil Teknik Analisis Data.....	71
E. Pembahasan.....	76

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Item Pengungkapan CSR.....	20
2. Kriteria Pengambilan Sampel Perusahaan Manufaktur Tahun 2008-2011.....	38
3. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2011.....	39
4. Indeks Luas Pengungkapan Sosial (CSR) perusahaan Sampel.....	53
5. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lingkungan Hidup).....	54
6. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Energi).....	55
7. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).....	56
8. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lain-lain Tenaga Kerja).....	57
9. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Produk).....	58
10. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Keterlibatan Masyarakat).....	59
11. Persentase Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Umum).....	60
12. Kepemilikan Manajerial Perusahaan Sampel.....	61
13. Kepemilikan Publik Perusahaan Sampel.....	63
14. Total asset Perusahaan Sampel.....	65
15. Descriptive Statistic.....	

16. Uji Normalitas Residual.....	68
17. Uji Multikolinearitas.....	69
18. Uji Heterokedastisitas.....	70
19. Uji Autokorelasi.....	71
20. Uji Regresi Linear Berganda.....	72
21. Uji Koefisien Determinasi.....	73
22. Uji F (Anova).....	74
23. Uji Hipotesis (t – test).....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel Tabulasi Corporate Social Responsibility/CSR (Tanggung Jawab Sosial).....	87
2. Tabel Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial/CSR.....	95
3. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011.....	98
4. Indeks Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial/CSR Perusahaan Sampel Tahun 2008-2011.....	99
5. Kepemilikan Manajerial Perusahaan Sampel Tahun 2008-2011.....	100
6. Kepemilikan Publik Perusahaan Sampel Tahun 2008-2011.....	101
7. Total Asset Perusahaan Sampel Tahun 2008-2011.....	102
8. Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, dan Descriptive Statistic.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahun perusahaan yang telah *go public* wajib menerbitkan laporan tahunannya. Laporan ini berisi data keuangan maupun data non keuangan yang digunakan oleh investor, kreditur, dan pengguna lainnya dalam menganalisis kondisi perusahaan untuk keperluannya masing-masing. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan.

Penyediaan informasi yang luas dalam laporan keuangan merupakan keharusan yang disebabkan adanya permintaan berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan *stakeholder* lainnya. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Tanggung jawab sosial itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan maupun non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Sembiring, 2005).

Di Indonesia wacana CSR mulai mengemuka pada tahun 2001, namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi

mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti: standar pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditornya). Disamping itu, sektor pasar modal Indonesia juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *Corporate Sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR.

Menurut Hill et. al., dalam Utami (2009), *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah selayaknya dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan menyelaraskan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut dengan produk dan *image* perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh perusahaan rokok bisa melakukan program kemitraan dengan para petani tembakau, perusahaan produsen susu bisa melakukan program kerja sama dengan para peternak sapi setempat dan lain sebagainya.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan/akibat lain yang terjadi dari kegiatannya. Namun, bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI, pengungkapan kegiatan sosial seperti CSR telah diatur dalam peraturan Bapepam No. Kep-13/BL/2006. Pengungkapan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility disclosure*) juga diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 74. UU.

Perlakuan Undang-undang tersebut mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Namun Undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu sektor apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sanksi yang dikenakan apabila melanggar, berapa besar anggaran minimum, serta format pelaporan CSR.

Corporate social responsibility disclosure (CSR) di dalam laporan tahunan mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* (pemegang saham, investor, masyarakat, pemerintah, kreditor) lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* (pemegang saham, investor, masyarakat, pemerintah, kreditor) tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan *corporate social responsibility* (CSR) lingkungan dan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Susanto (2007) perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Wibisono (2007) implementasi CSR pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) terkait dengan komitmen pimpinan, (2) ukuran dan kematangan perusahaan (umur perusahaan), dan (3) regulasi sistem perpajakan.

Sedangkan menurut Solihin (2009), perkembangan CSR pada umumnya dipengaruhi oleh (1) Manajemen para pemangku kepentingan, (2) *Corporate Social responsiveness*, (3) *Corporate Citizen*, (4) *Corporate social performance*, dan (5) *Corporate governance*.

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajemen, dan dewan komisaris. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, keputusan dan aktivitas di perusahaan tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelarsakan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri (Wahyudi, 2006). Menurut hasil penelitian Bulcholt (Beliveau et al 1994) dalam Solihin (2009) keterlibatan manajer dalam kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) akan turut meningkatkan reputasi manajer dimata publik.

Persentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di dalam program CSR (Retno, 2006). Selain itu Damsetz (1986) dalam Junaidi (2006) berargumen bahwa kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

Selain manajer, perusahaan yang sudah *go public* adalah milik publik. Kepemilikan publik yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghilangkan perilaku opportunistik manajer. Berdasarkan perspektif teorikal Selfer dan Vishny (1986) dalam Sembiring (2005) berpendapat bahwa kepemilikan publik yang besar mempunyai dorongan untuk memonitor manajer agar melakukan aktivitas yang sesuai dengan kepentingan pemilik. Semakin besar kepemilikan publik maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan publik dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selain kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik, ukuran perusahaan juga merupakan hal yang penting dalam sebuah pengungkapan. Menurut et. al., dalam Sembiring (2005), perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan besar lebih mempunyai potensi kontribusi dari pada perusahaan kecil (Wibisono, 2007). Sehingga pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial lebih banyak dilakukan oleh perusahaan besar.

Adapun fenomena yang terjadi dapat kita lihat pada PT Lapindo Brantas yang dalam implementasinya telah terjadi pergeseran orientasi yaitu kebijakan

pembangunan yang cenderung mengabaikan faktor kelestarian lingkungan. PT Lapindo dengan sengaja tidak memasang *casing* pada kedalaman yang telah ditentukan sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas untuk menghemat biaya operasional, sehingga menyebabkan bencana besar yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan diwilayah dekat rumah tinggal, dekat bangunan umum dan wilayah pabrik. Sementara lokasi pengeboran sumur berada 600 meter dari pemukiman warga. Namun pemerintah daerah justru meloloskan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) berikut turunan izin lainnya terhadap kegiatan usaha ini. Seharusnya dalam dokumen UKL/UPL tersebut, sudah diperkirakan bagaimana kondisi geografis wilayah tersebut dan desain (pengeboran) apa yang seharusnya dirancang untuk menghadapi situasi tersebut.

Berbagai penelitian yang terkait dengan *corporate social responsibility disclosure* (CSR) perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Sembiring (2005) dan Nofandrilla (2008) menemukan pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan (*firmsize*) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno (2006) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berkaitan dengan struktur kepemilikan, Machmud&Djaman (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan

tanggung jawab sosial. Namun Nofandrilla (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini juga melihat apakah setelah dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya disebutkan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial, perusahaan *go public* akan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunannya.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas serta motif dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Corporate social responsibility disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dipengaruhi oleh kepemilikan Manajerial
2. *Corporate social responsibility disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dipengaruhi oleh kepemilikan publik

3. *Corporate social responsibility disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan
4. *Corporate social responsibility disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dipengaruhi oleh tingkat *leverage*
5. *Corporate social responsibility disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dipengaruhi oleh profitabilitas
6. *Corporate social responsibility disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dipengaruhi oleh tipe industri

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur.

D. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *corporate social disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan?
2. Sejauhmana pengaruh kepemilikan publik terhadap *corporate social disclosure* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan?
3. Sejauhmana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis, Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan penulis serta dapat mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan
2. Bagi perguruan tinggi, Bagi perguruan tinggi, dapat menambah literatur mengenai *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang *go public*

3. Bagi perusahaan-perusahaan terkait, dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan-perusahaan manufaktur lebih memperluas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunannya.
4. Bagi Investor dan pengguna laporan keuangan, memberikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan

The World Bussiness Council for Subtainable Development dalam Nurlela dan Islahudin (2008) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai:

“Komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan”.

Sedangkan ISO 26000 dalam Nurlela dan Islahudin *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah:

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang berlaku yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi yang menyeluruh”.

ACCA (dalam Retno, 2006) menyatakan bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat diungkapkan didalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya

didalam konteks pembangunan berkelanjutan. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Sitepu (2009) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan.

Pengertian lain mengenai CSR dikemukakan oleh Baker (2007) dalam Marpaung (2010) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah bagaimana cara perusahaan mengelola proses bisnisnya untuk menghasilkan segala hal yang positif yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Pengertian CSR menurut Baker tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan CSR bukan saja hanya untuk melepas kewajiban terhadap peraturan saja, tetapi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. CSR bukan hanya untuk menaikkan *image* perusahaan, tetapi sebagai bagian operasi non keuangan dari perusahaan.

a. Manfaat dan Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Alasan-alasan perusahaan melakukan pengungkapan sosial antara lain:

- 1). *Internal Decission Making* : Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
- 2). *Product Diferentiation* : Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggungjawab secara sosial kepada masyarakat.

3). *Enlightened Self Interest* : Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para *stakeholder* karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham, tetapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Adapun tujuan dari CSR adalah:

- 1) Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankannya.
- 2) Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat
- 3) Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor

Menurut Wibisono (2007) ada tiga alasan mengapa perusahaan mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan operasi usahanya yaitu:

- 1) Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat
- 2) Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme
- 3) Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi yang dimiliki diberbagai bidang. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankannya, perusahaan diharapkan tidak mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Menurut Susanto (2007) dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang diperoleh dari aktivitas CSR yaitu:

- 1) Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan
- 2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis
- 3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan
- 4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdernya*
- 5) Meningkatkan penjualan
- 6) Insentif-insentif seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya.

b. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Menurut Hendriksen (2002) pengungkapan (*disclosure*) adalah penyajian informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk mencapai operasi pasar modal yang efisien.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Ketua BAPEPAM. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan informasi melebihi dari yang telah diwajibkan oleh BAPEPAM. Pengungkapan sukarela disajikan dalam rangka keterbukaan emiten untuk tujuan analisis investasi.

Suwardjono (2005) menyatakan tujuan dari pengungkapan (*disclosure*) ada tiga, yaitu :

a. Tujuan Melindungi

Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

b. Tujuan Informatif

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan.

Tingkat pengungkapan juga tergantung pada standar yang dianggap paling diinginkan. Menurut Chairiri (2001) dalam Retno (2006) terdapat tiga konsep pengungkapan yaitu pengungkapan yang cukup (*adequate*), pengungkapan wajar (*fair*), dan pengungkapan lengkap (*full*). Sementara tingkat kualitas dari *disclosure* (pengungkapan) adalah tingkat kedetailan (*deggre of detail*), ketepatan waktu (*timeliness*), kejelasan (*clarity*).

Gray et al 1995 (dalam Rosmasita, 2007) menyebutkan tiga studi yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh emiten tersebut. Darwin (2004) dalam Retno (2006) mengatakan bahwa *Corporate sustainability reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) dalam Retno (2006) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan.

Pengungkapan sosial sebagai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan sangat perlu dilakukan karena perusahaan memperoleh nilai tambah dari kontribusi masyarakat disekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber-sumber sosial (*Social resources*). Jika aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber-sumber sosial maka dapat timbul adanya biaya sosial (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedangkan apabila perusahaan meningkatkan mutu resources maka akan menimbulkan *social benefit* (manfaat sosial).

c. Pelaporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

Di Indonesia Tanggungjawab Sosial Perusahaan telah tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan. Adapun isi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam UU PT diatas, definisi tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan lebih menitik beratkan kepada pengembangan komunitas. Berdasarkan undang-undang tersebut direksi wajib mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan di Indonesia berpedoman kepada standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. (1 Revisi 2007) paragraf 9 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Kategori tanggung jawab sosial perusahaan menurut William (1999) dalam Kartika (2008) meliputi lima tema antara lain: (1) *environment*, (2) *energy*, (3) *human resource and management*, (4) *product and customers*, dan (5) *Community*. Bramme, Brooks dan Pavelin (2006) pengukuran CSR dengan mempertimbangkan tiga parameter CSR yaitu *employment*, *environment*, dan *community*.

Dalam menjalankan aktivitasnya CSR tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.

Implementasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan (Susanto, 2008). Menurut Wibisono

(2007) implementasi CSR pada umumnya di pengaruhi oleh faktor-faktor (1) terkait dengan komitmen pemimpin, (2) ukuran dan kematangan (umur) perusahaan dan (3) regulasi dan sistem perpajakan. Sedangkan menurut Darwin (2006) dalam pelaporan CSR harus mengungkapkan tipe perusahaan, parameter yang digunakan dalam laporan, serta kelola dan komitmen-komitmen serta tata hubungan dengan *stakeholder*. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Penilaian terhadap CSR bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR. Penilaian yang tepat harus memberikan pemahaman mengenai hal-hal:

- 1) Nilai-nilai dan etika perusahaan
- 2) Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi perusahaan untuk menjalankan aktivitas CSR
- 3) Isu-isu penting seputar CSR yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan
- 4) *Stakeholder-stakeholder* kunci
- 5) Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam mengimplementasikan program-program CSR yang terintegrasi
- 6) Implikasi terhadap sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki
- 7) Aktivitas-aktivitas berkaitan dengan CSR yang sedang berjalan

Penilaian bertujuan agar perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR secara berkesinambungan, tidak bersifat parsial. Penilaian CSR juga membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang yang ada sehingga mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penilaian CSR menurut Susanto (2007) sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim kepemimpinan CSR
- 2) Merumuskan definisi CSR
- 3) Melakukan kajian terhadap dokumen, proses dan aktivitas perusahaan
- 4) Mengidentifikasi dan melibatkan *stakeholder* kunci

Selanjutnya Sembiring (2005) dengan memodifikasi bentuk pengungkapan sosial Hackson dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005):

Tabel 1
Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial/CSR

No	Item Pengungkapan Tanggungjawab Sosial
1.	Lingkungan Hidup
	1. Pengendalian polusi kegiatan operasi : pengeluaran riset dan untuk pengurangan polusi 2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi/memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku 3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi 4. Pencegahan /perbaikan lingkungan akibat pengolahan sumber alam misalnya reklamasi daratan/reboisasi 5. Koservasi sumber alam misalnya mendaur ulangkaca, kaca, kertas, dll 6. Penggunaan material daur ulang 7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan 8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan

	10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah 11. Pengolahan limbah 12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 13. Perlindungan lingkungan hidup
2.	Energi
	1. Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 3. Penghematan energi sebagai hasil dari produk daur ulang 4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 5. Peningkatan efisiensi energi produk 6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi produk 7. Kebijakan energi perusahaan
3.	Kesehatan dan keselamatan kerja
	1. Mengurangi polusi, iritasi/resiko dalam lingkungan kerja 2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik & mental 3. Statistik kecelakaan kerja 4. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja 5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 8. Pelayanan kesehatan dan tenaga kerja
4.	Lain-lain tenaga kerja
	1. Perekrutan/pemanfaatan tenaga kerja wanita/orang cacat 2. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkatan manajerial 3. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat 4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 5. Pelatiha tenaga kerja wanita/orang cacat 6. Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 8. Bantuan/bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri/telah membuat kesalahan 9. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan 10. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi 11. Persentase gaji untuk pensiun 12. Kebijakan penggajian dalam perusahaan 13. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 14. Tingkatan manajerial yang ada 15. Disposisi staf dimana staf ditempatkan 16. Jumlah staf, masa kerja, dan kelompok usia mereka 17. Statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja 18. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 19. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja

	20. Rencana pembagian keuntungan lain 21. Informasi hubungan manajerial dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan 23. Laporan tenaga kerja yang terpisah 24. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh 25. Gangguan dan aksi tenaga kerja 26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja di negosiasikan 27. Kondisi kerja secara umum 28. Reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 29. Statistik perputaran tenaga kerja
5.	Produk
	1. Pengembangan produk perusahaan termasuk pengawasannya 2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk 4. Produk memenuhi standar keselamatan 5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen 6. Melaksanakan riset atau tingkatan keselamatan produk perusahaan 7. Peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk 8. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 9. Informasi atas keselamatan produk perusahaan 10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misal:ISO 9000)
6.	Keterlibatan Masyarakat
	1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni 2. Tenaga kerja paruh waktu dan mahasiswa/pelajar 3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 4. Membantu riset medis 5. Sponsor untuk konferensi pendidikan seminar/pameran seni 6. Membiayai program beasiswa 7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 8. Sponsor kampanye nasional 9. Mendukung pengembangan industri lokal
7.	Umum
	1. Tujuan kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat 2. Informasi berhubungan dengan tanggungjawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas

2. Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan adalah media kontrol pemegang saham terhadap perusahaan yang diwakili oleh dewan direksi dan manajer. Pemegang saham memantau dewan direksi dan manajer dalam setiap pengambilan keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Fakhrial (2007), kepemilikan manajerial merupakan saham dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu-individu ataupun kelompok elit yang berasal dari dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perusahaan (komisaris, direktur, dan manajer). Dalam laporan keuangan keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Seseorang pemegang saham ikut memiliki segala sesuatu yang menjadi milik perusahaan dan juga ikut dalam hal menanggung risiko dan kewajiban perusahaan.

Ibrahim (2002) dalam Retno (2006) mengatakan ada dua tipe kepemilikan manajer yaitu:

- a. Kepemilikan minoritas adalah suatu keadaan dimana 20%-50% jumlah saham perusahaan publik dimiliki oleh individu yang berkepentingan dalam perusahaan.
- b. Kepemilikan manajemen yaitu suatu keadaan dimana kurang dari saham perusahaan publik dimiliki oleh individu yang berkepentingan dalam perusahaan.

Peran serta manajemen dalam perusahaan sangatlah penting karena dengan adanya manajemen semua aktivitas perusahaan lebih terkendali. Wild (2005) menyatakan bahwa manajer memiliki kontrol utama atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Penilaian manajemen diperlukan dalam rangka penentuan angka-angka dalam laporan keuangan. Penilaian manajer dilakukan karena standar akuntansi sering kali memungkinkan manajer untuk memilih diantara alternatif metode akuntansi dan juga karena estimasi diperlukan untuk dapat menghitung angka akuntansi. Walaupun demikian peran serta pihak lain dalam perusahaan juga perlu dipertimbangkan meskipun masing-masing perusahaan mereka mempunyai kepentingan yang berbeda.

Keraf (1998) dalam Retno (2006) menyatakan pada tingkat operasional, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan diwakili secara formal oleh pihak manajemen. Pihak manajemen telah menerima kepercayaan untuk menjalankan perusahaan. Oleh karena itu seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan ada ditangan manajer.

Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Perbedaan kepentingan pihak-pihak dalam perusahaan menyebabkan masing-masing berlomba untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibanding dengan kepentingan perusahaan. Pihak manajemen lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif, seperti kemakmuran individu seperti kemakmuran individu, keselamatan kerja, gaya hidup, dan lain-lain. Hal ini juga menuntut pihak manajer untuk memaksimalkan kepentingan dirinya, karena semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

3. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Publik disini adalah pihak individu yang berada diluar lingkaran manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Sementara itu perusahaan Perseroan (PT) yang memiliki saham tidak dikategorikan publik. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pemilik PT tersebut adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Semakin banyak saham yang dijual maka semakin banyak pula saham yang beredar. Semakin besar porsi kepemilikan publik, semakin banyak butir-butir informasi tentang perusahaan yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan.

Menurut Irawan (2006) menyatakan bahwa proporsi saham yang dimiliki oleh pihak publik mempunyai pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi saham publik

yang tinggi memiliki kontrol yang lebih baik dibanding perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham oleh publik kecil, artinya dalam pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan dipengaruhi oleh kepentingan pihak publik sebagai salah satu pemilik saham perusahaan. Pengungkapan informasi yang lebih luas dibutuhkan oleh pihak publik dan para pemegang saham lainnya untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi serta kinerja perusahaan.

Selanjutnya Bathala et al (1994) dalam Ilahi (2011) menyatakan bahwa kehadiran investor institusional sebagai monitoring agent sangat efektif untuk mengurangi biaya keagenan. Hal ini disebabkan karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer.

4. Ukuran Perusahaan

Salah satu faktor fundamental perusahaan yang perlu diperhitungkan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aktiva, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain (Suwito dan Herawati, 2005). Sesuai dengan teori keagenan, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Sembiring, 2005)

Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Gordon (1985) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa beberapa faktor penentu seperti karakteristik dari suatu organisasi atau perusahaan dan industri dimana perusahaan beroperasi akan

menjelaskan ruang lingkup suatu kultur perusahaan. Ukuran dari suatu struktur perusahaan serta posisi pasar merupakan faktor yang menjadi karakteristik atau gambaran tentang perusahaan atau organisasi.

Pada dasarnya perusahaan dapat terbagi dalam dua kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Menurut keputusan BAPEPAM No 9 tahun 1995 berdasarkan ukurannya perusahaan dapat digolongkan atas dua kelompok sebagai berikut:

a. Perusahaan menengah/kecil

Perusahaan menengah atau kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

- 1) Memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari 20 Milyar
- 2) Bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil
- 3) Bukan merupakan reksadana

b. Perusahaan menengah/besar

Perusahaan menengah atau besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia

Total aktiva merupakan salah satu dasar penentuan ukuran perusahaan (Machfoed, 1998). Total aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan penting dalam operasional sesuai dengan kelompok dari aktiva tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang total asetnya kecil (Daniati & Suhairi, 2006)

Sembiring (2005) menyatakan bahwa tingkat informasi akuntansi yang disiapkan atau dibutuhkan oleh perusahaan bergantung pada ukuran perusahaan, baik berdasarkan jumlah perusahaan maupun berdasarkan penjualan. Menurutny semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula tingkat penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang menghubungkan variabel-variabel tertentu dengan *corporate social disclosure* telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) berusaha meneliti karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan tingkat pengaruh variabel independen yaitu *size*, *profitabilitas*, *profile*, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial. Adapun secara parsial tiga variabel yaitu *size*, *profile*, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial, sedangkan *profitabilitas* dan *leverage* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

Penelitian Retno (2006) meneliti pengaruh persentase kepemilikan manajemen, tingkat *leverage*, tipe industri, biaya politis, dan profitabilitas terhadap pengungkapan informasi sosial pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian ini yaitu dua variabel berpengaruh signifikan terhadap jumlah informasi sosial yang diungkapkan yaitu kepemilikan manajemen dan tipe industri. Adapun tiga variabel lainnya yakni tingkat *leverage*, biaya politis, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial.

Machmud dan Djakman (2008) mengadakan penelitian untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institusional sebagai pertimbangan perusahaan pengungkapan CSR pada laporan tahunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sementara Marpaung (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan. Marpaung (2009) menemukan bahwa struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Anggraini (2011) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam *annual report* menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.

Banyaknya penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh beberapa variabel keuangan tertentu terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan, mendorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut atas temuan-temuan empiris mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

6. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kepemilikan manajerial yaitu persentase saham yang dimiliki oleh manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008) kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dan komisaris. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Retno (2006) menemukan bahwa variabel persentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di dalam program CSR. Selain

itu, Damsetz (1986) dalam Junaidi (2006) berargumen bahwa kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmasita (2007), Nofandrilla (2008), dan juga menyatakan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Kepemilikan manajerial menyebabkan berkurangnya tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat dalam menciptakan nilai untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Jika struktur kepemilikan lebih banyak berada ditangan manajemen, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur dan melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan CSR. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya untuk meningkatkan image perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

b. Hubungan Kepemilikan Publik terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Kepemilikan saham oleh publik umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan publik, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004 dalam Rahajeng, 2010).

Menurut Irawan (2006) menyatakan bahwa proporsi saham yang dimiliki publik mempunyai pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi saham publik yang tinggi memiliki kontrol yang lebih baik dibanding perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham oleh publik kecil, artinya dalam pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan dipengaruhi oleh kepentingan pihak publik sebagai salah satu pemilik saham perusahaan. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian lain seperti Restia (2010), Machmud dan Djakman (2008), dan dan Ilahi (2011) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (*deviden*) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus-menerus (*going concern*) serta mengindikasikan semakin banyaknya kegiatan operasional perusahaan yang diketahui publik sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas. Kepemilikan publik juga berarti bahwa adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi langsung kepada perusahaan. Tentunya dengan semakin meningkatnya kepemilikan atau keinginan publik untuk memiliki saham perusahaan akan menimbulkan pengaruh kepada perusahaan. Pengaruh itu bisa saja dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau

aturan-aturan yang berkenaan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak publik tersebut, termasuk didalamnya kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas sosial (CSR) berupa pengolahan limbah, pengolahan lingkungan, pembinaan, pengembangan masyarakat lokal, dan berbagai kegiatan lainnya serta pengungkapan informasi-informasi sosial dari pelaksanaan aktivitas tersebut pada laporan tahunan perusahaan.

c. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial, karena perusahaan besar lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi daripada perusahaan kecil (Wibisono, 2007). Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001 dalam Sulastini, 2007).

Sembiring (2005) telah melakukan penelitian tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Rosmasita (2007), Nofandrilla (2008), Machmud dan Djakman (2009), dan Sulastini (2007) juga menemukan hasil yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian pada

lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat tuntutan masyarakat.

Secara umum perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan Perusahaan besar cenderung memiliki mempunyai dasarla pemikiran yang luas dan lebih kompleks. Perusahaan yang lebih besar jugs mempunyai aktivitasnyang lebih banyak, berdampak lebih besar pada lingkungan masyarakat, selain itu juga memiliki kecendrungan *public demand* yang lebih tinggi akan informasi.

Sementara perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan dirinya dalam posisi persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka dibuat kerangka konseptual yang dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berpijak dengan teori yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi utama bagi kepentingan manajemen maupun dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan

saat ini adalah informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). CSR adalah pengungkapan informasi-informasi sosial oleh perusahaan untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

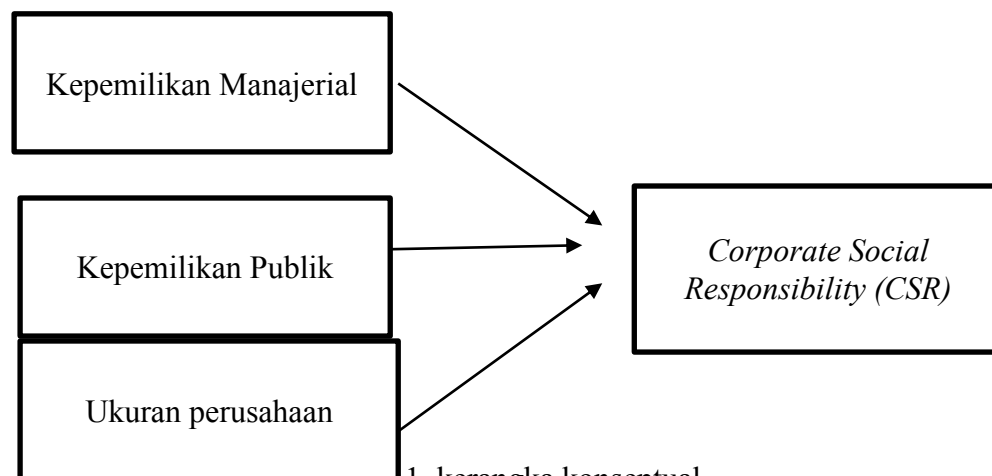
Corporate Social responsibility ditentukan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial pada perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan pada perusahaan tersebut serta mengurangi kesenjangan informasi antara manajer dan investor. Semakin banyak manajer memiliki saham suatu perusahaan maka akan baik pula usaha manajer untuk meminimalkan nilai perusahaan sehingga mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas dalam laporan keuangan.

Suatu perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar, maka tingkat pengawasan suatu perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan tidak dapat memutuskan suatu tindakan yang hanya berkepentingan untuk perusahaan saja. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan publik maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan publik dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya Suatu perusahaan. Pengukurannya dapat dilakukan melalui total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar memiliki informasi yang lebih banyak karena perusahaan yang lebih besar seharusnya mempunyai program-program sosial

sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat, sehingga perusahaan besar lebih transparan dalam pengungkapan informasi sosialnya.

Berdasarkan hubungan tersebut, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. kerangka konseptual

C. Hipotesis

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*

H2 : Kepemilikan publik berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*/CSR). Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ini berarti ada atau tidaknya kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaan.
2. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ini mencerminkan bahwa investor publik di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ini berarti bahwa semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan meningkatkan kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaannya.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas karena dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI hanya sebagian kecil yang menerbitkan laporan tahunannya.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini masih relatif besar, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan variabel lain yang diduga dapat memberikan estimasi yang lebih baik terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial/CSR perusahaan.
2. Bagi perusahaan emiten hendaknya meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan, yang dapat meningkatkan citra perusahaan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan serta merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*.
3. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan sebaiknya memperhatikan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan termasuk informasi sosial perusahaan dimana informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan.